

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1

2

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 3
Jabatan : 4
Bertindak untuk dan : 5
atas nama
Alamat : 6
Telepon/Fax. : 6
E-mail : 7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa8 sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. menerapkan standar pelayanan minimal;
- 2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
- 3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
- 4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

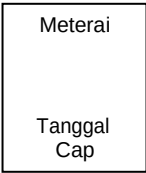
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20....9
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD
.....
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....



.....
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Keterangan:

1 diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
3 diisi nama lengkap.
4 diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja
5 diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
6 diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
7 diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD). 8 diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD). 9 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

MENTERI DALAM
NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²

PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :³
Jabatan :⁴
Bertindak untuk dan :⁵
atas nama
Alamat :
Telepon/Fax. :⁶
E-mail :⁷

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam **Pasal 18** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun **2007** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,⁸ bersedia untuk diaudit secara independen.

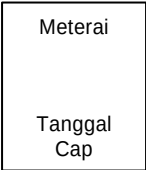
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....,20....⁹
SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD
.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....



(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
³ diisi nama lengkap.
⁴ diisi jabatan selaku pimpinan SKPD/ Unit Kerja.
⁵ diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
⁶ diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
⁷ diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD).
⁸ diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD).
⁹ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

MENTERI DALAM
NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN
PPK-BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD
Kepada :
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota³
.....
di⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

- 1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
- 2. Pola Tata Kelola;
- 3. Rencana Strategis Bisnis;
- 4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;⁴
- 5. Standar Pelayanan Minimum;
- 6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.⁵

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

.....,20....⁶

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Pemohon,
Kepala SKPD/Unit Kerja
yang akan menerapkan PPK-BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
³ pilih salah satu.
⁴ pilih salah satu
⁵ diisi salah satu Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
⁶ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

MENTERI DALAM
NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2007

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²

LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

.....20....³,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Keterangan:
¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
² diisi nama BLUD.
³ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
⁴ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

MENTERI DALAM
NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....1
.....2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan
Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang
berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan
lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan
dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-
bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD.....

.....,20....3

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....4

Keterangan:

- 1 diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- 2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 3 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat.
- 4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. lain-lain BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
B.						
	JUMLAH					

.....,20
Pemimpin BLUD

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

Keterangan:

1 diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
2 diisi Nama BLUD
3 diisi Nama BLUD.
4 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.
5 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS.)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. MARDIYANTO

PERWIRA

